



**YAYASAN JARI MUNGIL KREATIF  
MADRASAH TSANAWIYAH TERPADU ALAM JAMUR  
SUMATIF AKHIR SEMESTER BERBASIS ANDROID  
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

---

**Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila  
Kelas IX  
Senin, 1 Desember 2025  
Waktu mengerjakan jam 09.45 s/d 11.00 WITA**

---

**Bacalah teks berikut untuk mengerjakan soal nomor 1 – 7!**

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Keberagaman ini dapat menjadi kekuatan apabila dikelola dengan baik melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, serta semangat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pancasila menjadi dasar negara dan sumber hukum bagi seluruh peraturan, termasuk UUD 1945. Sementara itu, *Bhinneka Tunggal Ika* menuntun masyarakat Indonesia untuk hidup rukun dalam perbedaan. Ketiga hal ini saling berkaitan dan menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

1. Pancasila dan UUD 1945 memiliki hubungan yang erat karena ...
  - a. Pancasila dijadikan pedoman dalam membuat peraturan daerah saja
  - b. UUD 1945 menjadi sumber nilai bagi pelaksanaan Pancasila
  - c. Pancasila merupakan dasar dan sumber hukum bagi UUD 1945
  - d. UUD 1945 lebih tinggi kedudukannya dari Pancasila
2. Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* memiliki arti penting bagi kehidupan bangsa Indonesia karena ...
  - a. Mendorong persaingan antar suku dan agama
  - b. Menekankan perbedaan sebagai penghalang persatuan
  - c. Mengajarkan untuk menghargai perbedaan dalam persatuan
  - d. Menunjukkan bahwa Indonesia hanya terdiri dari satu suku bangsa
3. Penerapan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat diwujudkan dengan cara ...
  - a. Mengutamakan kepentingan daerah di atas kepentingan nasional
  - b. Meningkatkan rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa
  - c. Membentuk pemerintahan sendiri di setiap daerah
  - d. Mengabaikan peraturan dari pemerintah pusat
4. Hubungan antara Pancasila dan *Bhinneka Tunggal Ika* adalah ...
  - a. Pancasila menjadi dasar moral bagi pelaksanaan semangat kebersamaan dalam keberagaman
  - b. *Bhinneka Tunggal Ika* menjadi sumber nilai Pancasila
  - c. Keduanya tidak memiliki hubungan
  - d. *Bhinneka Tunggal Ika* hanya berlaku pada bidang politik
5. Salah satu contoh penerapan hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari adalah ...
  - a. Menolak aturan pemerintah jika tidak sesuai pendapat pribadi
  - b. Melaksanakan hak dan kewajiban warga negara sesuai konstitusi
  - c. Membeda-bedakan teman berdasarkan agama dan suku
  - d. Menganggap Pancasila hanya sekadar simbol negara

6. Pasangkan pernyataan pada Kolom A dengan jawaban yang tepat pada Kolom B!

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Pancasila sebagai dasar negara</b> | <b>Semboyan yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu"</b>             |
| <b>UUD 1945</b>                       | <b>Wujud dari semangat persatuan dan kesatuan bangsa</b>                  |
| <b>Bhinneka Tunggal Ika</b>           | <b>Menjadi pedoman dan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan</b> |
| <b>NKRI</b>                           | <b>Menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam pasal-pasal hukum</b>          |
| <b>Gotong royong antar warga</b>      | <b>Salah satu contoh penerapan nilai Bhinneka Tunggal Ika</b>             |

7. Pilihlah B jika pernyataan benar dan S jika pernyataan salah dengan memberi tanda centang (✓)!

| No. | PERNYATAAN  | BENAR | SALAH |
|-----|---|-------|-------|
| 1   | Pancasila merupakan dasar negara yang menjiwai seluruh pasal dalam UUD 1945                   |       |       |
| 2   | <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> hanya berlaku dalam bidang agama.                                 |       |       |
| 3   | NKRI menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia                            |       |       |
| 4   | UUD 1945 lebih tinggi kedudukannya daripada Pancasila.  |       |       |
| 5   | Menghargai perbedaan suku dan budaya merupakan wujud pengamalan <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> . |       |       |

**Bacalah teks berikut untuk mengerjakan soal nomor 8 – 9!**

Bangsa Indonesia berdiri atas dasar semangat persatuan yang kuat di tengah perbedaan. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber nilai bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam aturan hukum yang mengatur pemerintahan. Sementara semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* menegaskan bahwa walaupun berbeda-beda suku, agama, dan budaya, bangsa Indonesia tetap satu kesatuan yang utuh di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

8. Pasangkan pernyataan pada Kolom A dengan jawaban yang sesuai pada Kolom B!

|  |   |
|--|---|
| <b>Pancasila sila ketiga<br/>"Persatuan Indonesia"</b>           | <b>Menjadi pedoman tertulis<br/>yang menegakkan nilai-nilai<br/>Pancasila</b> |
| <b>UUD 1945 sebagai<br/>hukum dasar tertulis</b>                 | <b>Menjadi dasar bagi seluruh<br/>peraturan di Indonesia</b>                  |
| <b>Bhinneka Tunggal Ika</b>                                      | <b>Mengajarkan pentingnya<br/>menjaga keutuhan dan<br/>kesatuan bangsa</b>    |
| <b>Pancasila sebagai<br/>sumber dari segala<br/>sumber hukum</b> | <b>Mengandung makna<br/>persatuan dalam<br/>keberagaman</b>                   |
| <b>Bentuk nyata menjaga<br/>NKRI</b>                             | <b>Membela negara dan<br/>mematuhi hukum yang<br/>berlaku</b>                 |

9. Pilihlah B jika pernyataan benar dan S jika pernyataan salah dengan memberi tanda centang (√)!

| No. | PERNYATAAN   | BENAR | SALAH |
|-----|--|-------|-------|
| 1   | Pancasila dijadikan dasar bagi terbentuknya UUD 1945   |       |       |
| 2   | <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> berarti "bersatu karena sama"  |       |       |
| 3   | NKRI menolak adanya perbedaan suku dan budaya di Indonesia.  |       |       |
| 4   | Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat persatuan bangsa.                                   |       |       |
| 5   | Pancasila, UUD 1945, dan <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> saling berkaitan dalam membentuk keutuhan NKRI. |       |       |

**Bacalah teks berikut untuk mengerjakan soal nomor 10 – 16!**

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang berhak diterima, seperti hak mendapatkan pendidikan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan. Sementara kewajiban warga negara adalah tanggung jawab yang harus dilakukan, seperti menaati hukum, membayar pajak, dan membela negara.

Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang akan menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Yang dimaksud dengan *hak warga negara* adalah ...

- Sesuatu yang wajib dilakukan oleh warga negara kepada negara
- Sesuatu yang harus diberikan oleh warga negara kepada orang lain
- Sesuatu yang berhak diterima oleh warga negara dari negara
- Segala bentuk aturan yang harus dipatuhi oleh warga negara



11. Salah satu contoh pelaksanaan *kewajiban warga negara* adalah ...
- Mendapatkan perlindungan hukum
  - Mengikuti pemilihan umum
  - Mendapatkan pekerjaan yang layak
  - Menerima bantuan sosial
12. Apabila warga negara hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, maka akibatnya adalah ...
- Masyarakat menjadi tertib dan Makmur
  - Terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan bernegara
  - Pemerintah semakin kuat dan berwibawa
  - Rakyat semakin sejahtera
13. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.” Artinya ...
- Setiap warga negara bebas dari kewajiban hukum
  - Semua warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum
  - Hanya pejabat negara yang harus taat hukum
  - Hukum berlaku hanya untuk rakyat biasa
14. Kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara diatur dalam ...
- Pasal 27 ayat (3) UUD 1945
  - Pasal 28 UUD 1945
  - Pasal 30 ayat (1) UUD 1945
  - Pasal 31 ayat (2) UUD 1945.
15. Masih dengan Literasi diatas, pasangkan pernyataan pada Kolom A dengan jawaban yang sesuai pada Kolom B!

|   |  |
|---|--|
| <b>Hak mendapatkan pendidikan</b>             | <b>Membayar pajak tepat waktu</b>                            |
| <b>Kewajiban warga negara</b>                 | <b>Mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum</b>      |
| <b>Pasal 30 ayat (1) UUD 1945</b>             | <b>Menerima kesempatan belajar di sekolah</b>                |
| <b>Hak atas perlindungan hukum</b>            | <b>Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara</b> |
| <b>Kewajiban menaati peraturan pemerintah</b> | <b>Menjaga ketertiban dan mematuhi hukum yang berlaku</b>    |

16. Pilihlah B jika pernyataan benar dan S jika pernyataan salah dengan memberi tanda centang (✓)!

| No. | PERNYATAAN  | BENAR | SALAH |
|-----|---|-------|-------|
| 1   | Hak dan kewajiban warga negara harus dilaksanakan secara seimbang   |       |       |
| 2   | Warga negara boleh menuntut hak tanpa perlu melaksanakan kewajiban. |       |       |
| 3   | Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara.         |       |       |
| 4   | Hak atas pendidikan hanya dimiliki oleh warga negara yang kaya.     |       |       |
| 5   | Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.  |       |       |

17. Hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu contoh hak warga negara dalam bidang politik adalah ....

- Membayar pajak kepada negara
- Mengikuti pendidikan dasar
- Menyampaikan pendapat di muka umum
- Menjaga kelestarian lingkungan.

18. Rani ikut serta dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Tindakan Rani mencerminkan pelaksanaan ....

- Hak untuk hidup layak
- Hak memperoleh lingkungan bersih
- Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan
- Kewajiban mengikuti kegiatan sosial.

19. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, seorang warga negara yang baik harus ....

- Menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban
- Mengutamakan kepentingan pribadi
- Menjalankan kewajiban sebelum menuntut hak
- Menunggu orang lain menjalankan kewajibannya terlebih dahulu

20. Perhatikan pernyataan berikut!

- Ikut serta dalam pemilihan umum.
- Membayar pajak tepat waktu.
- Menuntut keadilan di pengadilan.
- Menjaga ketertiban umum.

Dari pernyataan di atas, yang termasuk **hak warga negara** adalah ....

- 1 dan 2
- 1 dan 3
- 2 dan 4
- 3 dan 4

21. Pasangkan pernyataan pada kolom A dengan makna atau tujuannya yang tepat pada kolom B!

|  |  |
|--|--|
| <b>Pemberian bantuan pendidikan gratis kepada siswa kurang mampu</b> | <b>Upaya negara dalam melindungi hak warga negara di bidang sosial</b>     |
| <b>Pemberian layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin</b>     | <b>Pelaksanaan kewajiban negara dalam bidang kesejahteraan rakyat</b>      |
| <b>Pembangunan rumah layak huni bagi warga tidak mampu</b>           | <b>Bentuk perhatian negara terhadap hak warga untuk hidup layak</b>        |
| <b>Program beasiswa bagi siswa berprestasi</b>                       | <b>Bentuk pelaksanaan hak warga untuk memperoleh pendidikan yang layak</b> |

22. Pilihlah B jika pernyataan benar dan S jika pernyataan salah dengan memberi tanda centang (✓)!

| No. | PERNYATAAN  | BENAR | SALAH |
|-----|---|-------|-------|
| 1   | Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang status sosial dan ekonomi |       |       |
| 2   | Melaksanakan kewajiban membayar pajak termasuk salah satu bentuk pelaksanaan hak warga negara         |       |       |
| 3   | Menjaga kebersihan lingkungan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan warga negara             |       |       |
| 4   | Mengikuti kegiatan pemilihan umum merupakan bentuk pelaksanaan hak sekaligus kewajiban warga negara   |       |       |
| 5   | Menuntut keadilan di pengadilan merupakan contoh pelaksanaan kewajiban warga negara.                  |       |       |

**Bacalah teks berikut untuk mengerjakan soal nomor 23 – 24!**

Pemerintah Indonesia terus berupaya memenuhi hak-hak dasar warga negaranya. Salah satunya melalui penyediaan pendidikan gratis bagi anak-anak usia sekolah dan pemberian layanan kesehatan melalui program BPJS. Di sisi lain, pemerintah juga menekankan pentingnya kesadaran warga negara dalam menjalankan kewajiban, seperti membayar pajak, menjaga kebersihan lingkungan, serta mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

Dalam kehidupan bernegara, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan, namun juga wajib berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Dengan keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban, cita-cita masyarakat adil dan makmur dapat terwujud.

23. Dari literasi diatas, Pilihlah B jika pernyataan benar dan S jika pernyataan salah dengan memberi tanda centang (✓)!

| No. | PERNYATAAN  | BENAR | SALAH |
|-----|---|-------|-------|
| 1   | Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang status sosial dan ekonomi |       |       |
| 2   | Melaksanakan kewajiban membayar pajak termasuk salah satu bentuk pelaksanaan hak warga negara         |       |       |
| 3   | Menjaga kebersihan lingkungan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan warga negara.            |       |       |
| 4   | Mengikuti kegiatan pemilihan umum merupakan bentuk pelaksanaan hak sekaligus kewajiban warga negara.  |       |       |
| 5   | Menuntut keadilan di pengadilan merupakan contoh pelaksanaan kewajiban warga negara                   |       |       |



24. Dengan literasi yang sama, pasangkan pernyataan pada kolom A dengan makna atau bentuk penerapan yang tepat pada kolom B!

|  |   |
|--|---|
| <b>Pemerintah menyediakan pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu</b> | <b>Pelaksanaan hak warga negara dalam bidang kesehatan</b>                |
| <b>Warga ikut serta dalam kerja bakti menjaga kebersihan lingkungan</b>      | <b>Pelaksanaan kewajiban warga negara di bidang sosial</b>                |
| <b>Membayar pajak tepat waktu sesuai peraturan</b>                           | <b>Pelaksanaan kewajiban warga negara di bidang ekonomi</b>               |
| <b>Masyarakat mendapatkan layanan BPJS Kesehatan</b>                         | <b>Pelaksanaan hak warga negara di bidang pendidikan</b>                  |
| <b>Warga ikut memilih dalam pemilu untuk menentukan pemimpin</b>             | <b>Pelaksanaan hak sekaligus kewajiban warga negara di bidang politik</b> |

25. Kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada **Pasal 28E ayat (3)** yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”* Pada era keterbukaan informasi seperti sekarang, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan pendapat melalui berbagai media, terutama media sosial. Namun, kebebasan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab agar tidak menimbulkan pelanggaran, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau pencemaran nama baik. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu memahami bahwa kemerdekaan berpendapat bukan berarti bebas tanpa batas, melainkan harus menghargai hak orang lain, menjaga etika, dan mematuhi hukum yang berlaku.

Dari literasi diatas, Pilihlah B jika pernyataan benar dan S jika pernyataan salah dengan memberi tanda centang (✓)!

| No. | PERNYATAAN   | BENAR | SALAH |
|-----|--|-------|-------|
| 1   | Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas tanpa perlu memperhatikan etika atau aturan hukum          |       |       |
| 2   | Menggunakan media sosial untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kemerdekaan berpendapat |       |       |
| 3   | Kemerdekaan berpendapat harus disertai tanggung jawab agar tidak merugikan pihak lain.   |       |       |
| 4   | Menyebarkan informasi palsu di media sosial termasuk wujud dari kemerdekaan berpendapat.   |       |       |
| 5   | Menghargai pendapat orang lain dalam diskusi menunjukkan sikap menghormati hak asasi manusia   |       |       |

Bacalah teks berikut untuk mengerjakan soal nomor 26 – 27!

Kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, khususnya **Pasal 28E ayat (3)** yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”*

Selain itu, **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998** juga mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Melalui peraturan ini, negara menjamin bahwa setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas dan bertanggung jawab. Namun, jaminan tersebut juga mengharuskan setiap individu untuk mematuhi hukum, menghormati hak orang lain, dan menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, kemerdekaan berpendapat bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan hak yang diiringi kewajiban moral dan sosial agar tercipta kehidupan demokratis yang sehat.

26. Dari literasi diatas, Pilihlah B jika pernyataan benar dan S jika pernyataan salah dengan memberi tanda centang (✓)!

| No. | PERNYATAAN   | BENAR | SALAH |
|-----|--|-------|-------|
| 1   | Kemerdekaan berpendapat di Indonesia dijamin sepenuhnya oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat (3)   |       |       |
| 2   | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 hanya mengatur tentang hak berkumpul, bukan menyampaikan pendapat                                       |       |       |
| 3   | Jaminan kebebasan berpendapat berarti warga negara boleh berbicara atau bertindak tanpa batas dan tanpa tanggung jawab.                  |       |       |
| 4   | Dalam menyampaikan pendapat, warga negara harus menghormati hak orang lain dan menaati hukum yang berlaku                                |       |       |
| 5   | Negara wajib melindungi setiap warga yang menggunakan haknya untuk berpendapat selama dilakukan dengan cara yang damai dan sesuai aturan |       |       |

27. Masih dengan literasi diatas, Pilihlah B jika pernyataan benar dan S jika pernyataan salah dengan memberi tanda centang (✓)!

| No. | PERNYATAAN   | BENAR | SALAH |
|-----|--|-------|-------|
| 1   | Jaminan kemerdekaan berpendapat di Indonesia hanya berlaku bagi warga negara yang bekerja di pemerintahan                                |       |       |
| 2   | Demonstrasi yang dilakukan dengan tertib dan damai merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hak berpendapat yang dijamin undang-undang    |       |       |
| 3   | Jika seseorang menyampaikan pendapat dengan menghina atau mencemarkan nama baik orang lain, maka tindakannya tetap dilindungi oleh hukum |       |       |
| 4   | Hak berpendapat warga negara tidak boleh dibatasi oleh siapa pun, termasuk oleh hukum negara   |       |       |
| 5   | Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan warga saat menyampaikan pendapat di muka umum                                     |       |       |



**Bacalah teks berikut untuk mengerjakan soal nomor 28 – 30!**

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokrasi. Masyarakat berhak mengetahui kebijakan, kegiatan, serta penggunaan anggaran oleh lembaga pemerintah. Hak ini dijamin dalam **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, yang bertujuan agar penyelenggaraan negara berjalan secara transparan dan dapat diawasi oleh masyarakat. Melalui keterbukaan informasi, warga negara dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan mengontrol jalannya pemerintahan. Namun, tidak semua informasi boleh disebarluaskan. Informasi yang bersifat rahasia negara, keamanan nasional, atau privasi seseorang tetap harus dilindungi. Dengan keseimbangan antara hak untuk tahu dan kewajiban menjaga kerahasiaan, keterbukaan informasi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

28. Pernyataan yang salah mengenai keterbukaan informasi public sesuai literasi di atas yaitu ....

- Keterbukaan informasi publik berarti semua data pemerintah harus diumumkan tanpa batas kepada masyarakat
- Keterbukaan informasi publik membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara
- Keterbukaan informasi publik mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi dan berpartisipasi dalam pemerintahan
- Keterbukaan informasi publik berarti masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran oleh lembaga pemerintah

29. Masih dengan literasi diatas, Pilihlah B jika pernyataan benar dan S jika pernyataan salah dengan memberi tanda centang (✓)!

| No. | PERNYATAAN   | BENAR | SALAH |
|-----|--|-------|-------|
| 1   | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dibuat agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi publik dari lembaga negara |       |       |
| 2   | Setiap lembaga pemerintah wajib menolak memberikan informasi apa pun kepada masyarakat demi keamanan nasional.           |       |       |
| 3   | Keterbukaan informasi publik hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.                     |       |       |
| 4   | Masyarakat dapat menggunakan haknya untuk memperoleh informasi publik guna mengawasi kinerja aparatur pemerintah         |       |       |
| 5   | Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin tetap diperbolehkan selama untuk kepentingan umum.                         |       |       |

30. Masih dengan literasi diatas, Pilihlah B jika pernyataan benar dan S jika pernyataan salah dengan memberi tanda centang (✓)!

| No. | PERNYATAAN   | BENAR | SALAH |
|-----|--|-------|-------|
| 1   | Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hak warga negara dalam bidang politik                 |       |       |
| 2   | Pemerintah berhak menolak memberikan informasi publik tanpa alasan yang jelas  |       |       |
| 3   | Keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah                         |       |       |
| 4   | Masyarakat dilarang meminta informasi terkait anggaran atau kebijakan pemerintah.  |       |       |
| 5   | Salah satu tujuan utama keterbukaan informasi publik adalah mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. |       |       |